



DPRKPLH
Kabupaten Temanggung

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027



**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung**

HALAMAN VERIFIKASI

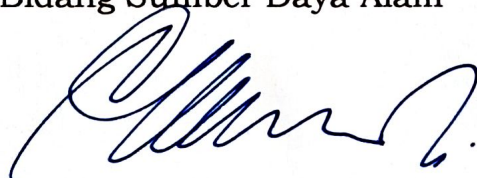
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal: 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Sumber Daya Alam



Ir. GUNADI, M.M.
NIP. 19680721 200701 1 017

Petugas Verifikator,



ELMA JANE Y P, S.P.W.K.
NIP. 19970204 202202 2 001

Mengetahui,

~~KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,~~

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) DPRKPLH Tahun 2027 dapat disusun dengan baik sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan DPRKPLH selama Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2027 merupakan implementasi dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

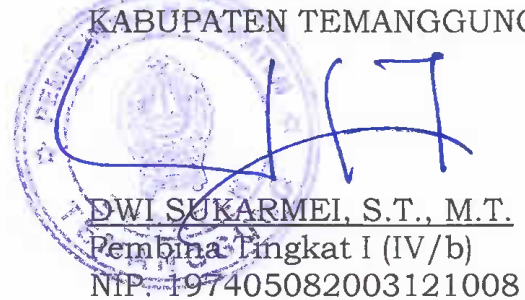
Renja DPRKPLH Tahun 2027 memuat tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunannya juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, isu-isu strategis, aspirasi masyarakat, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebutuhan pembangunan dan dinamika kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai

pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2027. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel, berkualitas, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Temanggung, 24 Juli 2026
KEPALA DPRKPLH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197405082003121008

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029.	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH	37
2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	37
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRKPLH .	95
2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD	105
2.5. <i>Review</i> terhadap rancangan awal RKPD.....	106
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	118
2.7. Inovasi Perangkat Daerah	118
2.8. Penghargaan	119
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	122
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	122
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH	122
3.3. Program dan Kegiatan DPRKPLH	128
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	163
4.1. Program dan Kegiatan.....	163
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	170
5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	170
5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027.....	170
BAB VI PENUTUP	173

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung.....	11
Tabel 2.2 Capaian Nilai IKM DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2021-2026	28
Tabel 2.3 Capaian Nilai AKIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026	29
Tabel 2.4 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026	30
Tabel 2.5 Capaian Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	31
Tabel 2.6 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026	32
Tabel 2.7 Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	32
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kab. Temanggung	23
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung	36
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung	37
Tabel 2.11 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	78
Tabel 2.12 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	79
Tabel 2.13 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	81
Tabel 2.14 Telaah Pokok Pikiran DPRD tahun 2027	94
Tabel 2.15 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027	96
Tabel 2.16 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung	106
Tabel 2.17 Daftar Inovasi Perangkat Daerah.....	106

Tabel 2.18 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	107
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2027	112
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2027	118
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2027	154
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama 2027.....	160
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

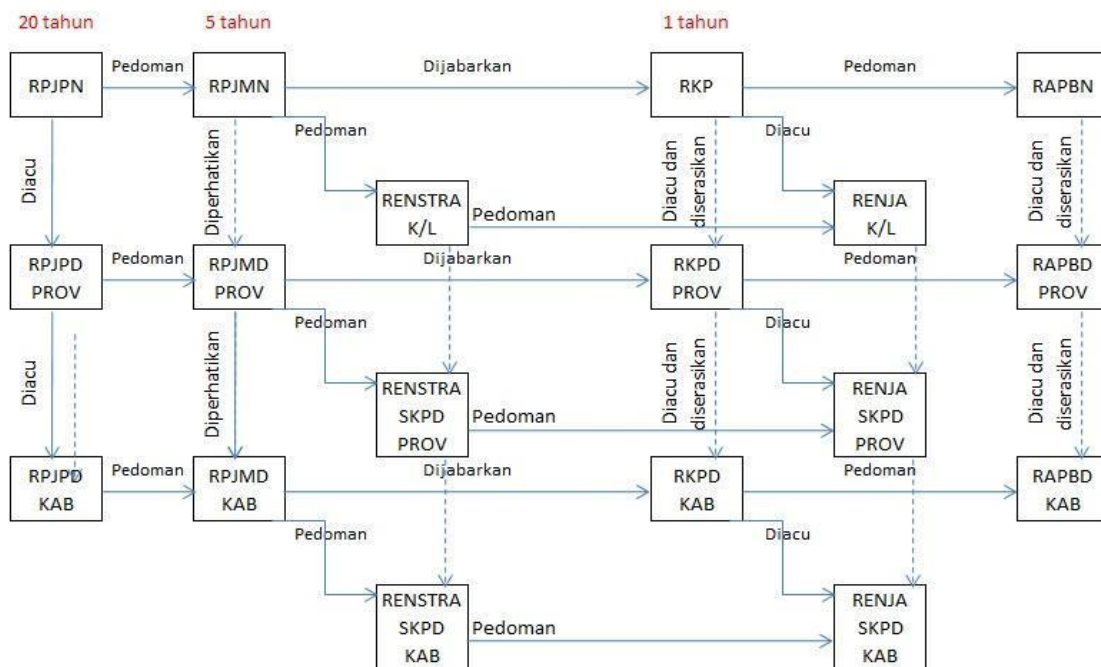
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja DPRKPLH Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPRKPLH Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPRKPLH, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPRKPLH, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPRKPLH;
- 2) Kondisi pelayanan DPRKPLH;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH;

- 4) Data Pokok Pembangunan DPRKPLH;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPRKPLH;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan DPRKPLH.

b. Analisis gambaran pelayanan DPRKPLH;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPRKPLH adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPRKPLH.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPRKPLH untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPRKPLH.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun lalu berdasarkan Renstra DPRKPLH;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPRKPLH. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPRKPLH dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPRKPLH tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DPRKPLH;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DPRKPLH;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPRKPLH.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPRKPLH dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPRKPLH;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRKPLH;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan

Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPRKPLH;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPRKPLH.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPRKPLH.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPRKPLH;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPRKPLH merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH;

Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPRKPLH dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPRKPLH dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPRKPLH yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPRKPLH untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPRKPLH Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja DPRKPLH Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPRKPLH Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPRKPLH Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2025 terhadap capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPRKPLH sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra DPRKPLH 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026
Kabupaten Temanggung

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							2.634.961.000		0	
1.03.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase jumlah TPS 3R	%	16,96	17,65	100	17,3		17,65		100
1.03.05.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						-	-	0	-	-
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang dibangun	Ton/Hari	2	2	100	-	-	0	-	-
		Pembangunan TPS 3R	Unit	4	4	100	-	-	0	-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							2.634.961.000		-	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100		100		100
		Cakupan Rumah Tangga dengan	%	8,06	0,80	9,93	13,06		0,85		6,51

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
		Akses Sanitasi Aman									
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							2.634.961.000		-	
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	0	0	0	250	2.634.961.000	0	-	0
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							3.554.599.252		61.396.182	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							409.999.252		55.234.033	
		Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100		100		100

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							10.000.000		1.368.500	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00	0	1	10.000.000	0	1.368.500	0
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							399.999.252		53.865.533	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	72	72	100	72	399.999.252	18	53.865.533	25,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							3.144.600.000		6.162.149	
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,37	96,70	100	96,43		96,7		100
		Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,80	48,80	100	48,81		48,8		100
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	66,88	68,38	100	69,06		68,38		99,02
		Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	79,93	78,79	98,57	80,03		78,79		98,45

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							3.144.600.000		6.162.149	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	37	37	100	149	3.144.600.000	0	6.162.149	0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100	100	100		100		100
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100		100		100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							22.500.000		280.092	
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100		0		0
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan	%	100	85,71	85,71	100		100		100

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
		kelayakan Lingkungan Hidup									
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten/Kota							22.500.000		280.092	
2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	1	22.500.000	0,75	280.092	75,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							237.000.000		315.000	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	60,02	60,15	100	60,03		60,15		100
		Luas Lahan kritis tertangani	Ha	3,75	33,13	100	4,00		3,564		89,10
		Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,08	7,08	100	7,40		7,083		95,72
		Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	20,90	30,23	100	23,30		2,326		9,98
		Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,70	15,69	99,91	15,70		0		0
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan							227.000.000		315.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1	100	1	27.000.000	0	-	0
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	25	40	100	25	200.000.000	1	315.000	4,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							10.000.000		-	
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1	33,125	100	4	10.000.000	4	-	89,1
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							5.940.000.000		27.035.700	
		Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	74,00	81,70	100		80,00		81,70	100
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							5.940.000.000		27.035.700	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	Ha	5,76	5,76	100	5,76	5.940.000.000	15	27.035.700	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
		Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							5.000.000		1.130.000	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	100	100		100		100
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							5.000.000		1.130.000	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan	Jumlah Badan usaha dan/atau	Badan Usaha	50	50	100	50	5.000.000	10	1.130.000	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
	Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	kegiatan yang diawasi									
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							15.000.000		645.000	
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,26	30,80	100	30,93		30,80		99,58
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							15.000.000		645.000	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelom- pok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni- tas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	-	-	-	5	15.000.000	-	645.000	0
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							5.000.000		270.028	
		Persentase penghargaan	%	100	100	100	100		-		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
		bidang lingkungan hidup									
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							5.000.000		270.028	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	1	100	3	5.000.000	-	270.028	-
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							5.000.000		475.000	
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100		100
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							5.000.000		475.000	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran	Jumlah pengaduan permasalahan	Pengaduan	-	-	-	1	5.000.000	2	475.000	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
	dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikel ola									
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							3.554.200.000		437.454.410	
		Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	%	33,34	33,84	100	34,14		32,02		93,80
		Persentase sampah yang terkelola	%	63,27	63,28	100	64,07		62,80		98,02
		Cakupan Pelayanan persampahan	%	76,12	76,47	100	77,85		76,47		98,23
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah							3.554.200.000		437.454.410	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	-	-	-	10	15.000.000	3	-	30,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Unit	5	5	100	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
		Pengolahan, dan Pemrosesan Akhi									
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	91.485	95.024,0 2	100	51.218	2.298.000.000	23.316	274.222.360	45,52322936
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	0	0	0	45.000	1.241.200.000	11.388	163.232.050	25
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							18.025.496.259		4.687.816.271	
		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100		100		100

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12.458.505.073		3.317.291.443	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1612	1.612	100	1.664	12.458.505.073	384	3.317.291.443	23,08
			Orang	124			128				
			Bulan	13			13				
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							85.000.000		1.550.000	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	5.000.000	3	-	25,00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	17.500.000	3	-	25,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	15.000.000	3	-	25,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	12	19.000.000	3	630.000	25,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	12	28.500.000	3	920.000	25,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100		44.950.000		-	
2.11.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	35	19.950.000	0	-	-
2.11.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Unit	2	2	100	4	25.000.000	0	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
							Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
		Lainnya yang Disediakan									
2.11.0. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5.273.441.656		1.360.479.828	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	12	1.425.000	3	100.000	25,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	100.000.000	3	24.683.470	25,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Laporan	12	12	100	12	5.172.016.656	3	1.335.696.358	25,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							163.599.530		8.495.000	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	24	100	26	85.500.000	6	5.745.000	23,08
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	1	68.099.530	1	-	100
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	12	12	100	12	10.000.000	4	2.750.000	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026							
				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9	10	11	12 = 10/8
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi									
	Jumlah							33.998.756.511		5.216.817.683	

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPRKPLH di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)
 - b. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik
 - c. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
 - d. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)
 - e. Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani
 - f. Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi
 - g. Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
 - h. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - i. Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola
 - j. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
 - k. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
 - l. Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
 - m. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup
 - n. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
 - o. Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah

2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah TPS 3R
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak
 - c. Persentase penanganan rumah tidak layak huni
 - d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
 - e. Luas Lahan kritis tertangani
 - f. Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung
 - g. Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara
 - h. Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan
 - i. Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah
 - j. Persentase sampah yang terkelola
 - k. Cakupan Pelayanan persampahan
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
 - b. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga
 - c. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
 - d. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung
4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman
Capaian cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2025 menurun dipengaruhi adanya penyesuaian kriteria akses sanitasi aman sesuai ketentuan Bappenas pada hasil analisis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)

- b. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga
 - Rumah tangga baru menikah belum memiliki rumah pribadi (masih menumpang orang tua)
 - Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni
 - c. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
 - Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang membutuhkan penyesuaian dalam regulasi dan pelaksanaan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan
 - Terdapat pengajuan permohonan persetujuan lingkungan dalam proses perbaikan dokumen
 - d. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
 - Adanya pengaruh faktor cuaca
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
- Salah satu indikator program yang berpotensi memiliki tingkat pencapaian rendah pada akhir tahun adalah Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Kondisi tersebut disebabkan adanya penyesuaian kriteria akses sanitasi aman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappenas, sebagaimana hasil analisis dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Penyesuaian kriteria tersebut berdampak terhadap perhitungan capaian indikator, sehingga target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah berpotensi tidak tercapai secara optimal pada akhir tahun.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - a. Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman
 - Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi
 - Pengusulan untuk pengadaan sarana dan prasarana IPLT
 - Optimalisasi layanan IPLT
 - b. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga
 - Mendukung pengembang perumahan dalam menyelenggarakan rumah umum dan subsidi
 - Mengusulkan program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni melalui berbagai sumber anggaran
 - c. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP, DLHK Provinsi dan KLH
 - d. Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung
Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa DPRKPLH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **96,56%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) sebanyak 6 indikator dengan capaian sebagai berikut :
 - a. IKUPD dengan Capaian sebesar 100% (3 Indikator)

- Nilai IKM Perangkat Daerah

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.2
Capaian Nilai IKM DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	NILAI IKM	-	-	-	78,14	85,67	85,67

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Nilai IKM DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Capaian tahun 2026 masih menggunakan capaian tahun 2025 hal tersebut disebabkan belum ada update data terkait nilai IKM DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong terkait capaian Nilai IKM antara lain adanya layanan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Selanjutnya, dilaksanakan survei secara mandiri terkait kualitas pelayanan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasana pengangkutan maupun kualitas bangunan sehingga berdampak pada kualitas dalam pelayanan. Sebagai upaya tindaklanjutnya diperlukan adanya peningkatan kualitas layanan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

- Nilai AKIP Perangkat Daerah

AKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta keberhasilan dalam

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Penilaian AKIP menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented).

Tabel 2.3
Capaian Nilai AKIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	NILAI IKM	-	-	-	71,90	74,90	74,90

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian Nilai AKIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Capaian tahun 2026 masih menggunakan data capaian tahun 2025 hal ini disebabkan karena masih dalam tahap penilaian. Faktor pendorong capaian indikator tersebut adalah kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen dari pimpinan terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belum optimalnya tingkat pemahaman seluruh ASN dalam penerapan dan komitmen terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga diperlukan peningkatan pemahaman seluruh ASN dalam pelaksanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- Indeks Kualitas Air

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan

pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Tabel 2.4
Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	54,45	52,22	64,07	59,63	74,71	74,71

Realisasi indikator IKU tahun 2025 didukung adanya sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengujian kualitas udara, Pengujian kualitas udara Semester I dan Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Kementrian Lingkungan Hidup. Terjadi penurunan nilai dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dikarenakan adanya perubahan perhitungan sesuai regulasi PP 22 Tahun 2021 dan penambahan parameter partikular PM 2,5 yang bersumber dari data Citra Satelit.

Untuk capaian tahun 2026 masih menggunakan data tahun 2025, hal ini disebabkan karena akan dilaksanakan pengujian triwulan I dan triwulan II tahun 2026.

b. IKUPD yang belum tercapai 100%

- Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan capaian 99,18%

Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian fundamental dari upaya pemerintah dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.5
Capaian Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	NA	NA	NA	70,83	71,11	71,12

Berdasarkan capaian indikator di atas, capaian indikator persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dari tahun 2021-2026, capaian yang dapat dibandingkan hanya mulai tahun 2024 karena beberapa indikator merupakan indikator baru.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja antara lain:

1. Dukungan anggaran DAK Bidang Sanitasi untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti SPALD-S dan TPS 3R
2. Dukungan anggaran APBD dan CSR untuk kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025
3. Layanan penyedotan Lumpur Tinja

Dalam pelaksanaannya, masih dihadapi dengan kendala yang ada antara lain

1. Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik sehingga pembangunan infrastruktur dasar dalam bidang sanitasi masih bertumpu dengan anggaran DAK
2. Layanan penyedotan Lumpur Tinja belum dapat Terjadwal (L2T3)

Sebagai upaya tindaklanjutnya dapat dillakungan dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
 2. Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi
 3. Mengupayakan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).
- Indeks Kualitas Udara dengan capaian 90,86%
Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu.

Tabel 2.6
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	80,89	83,82	85,10	87,84	77,23	77,23

Realisasi indikator IKU tahun 2025 didukung adanya sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengujian kualitas udara, Pengujian kualitas udara Semester I dan Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Kementrian Lingkungan Hidup. Terjadi penurunan nilai dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dikarenakan adanya perubahan perhitungan sesuai regulasi PP 22 Tahun 2021 dan penambahan parameter partikular PM 2,5 yang bersumber dari data Citra Satelit.

Untuk capaian tahun 2026 masih menggunakan data tahun 2025, hal ini disebabkan karena akan dilaksanakan pengujian triwulan I dan triwulan II tahun 2026.

- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan capaian 89,44%

Tabel 2.7
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN	
		2025	2026
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO ₂ eq	706.302,32	713.957,59

Penurunan emisi gas rumah kaca didorong oleh kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran publik, namun dalam pelaksanaannya terhambat oleh ketergantungan pada energi fosil antara lain penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor dan industri selain itu biaya awal teknologi bersih yang cukup tinggi, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan upaya tindak lanjut berupa peningkatan penggunaan energi terbarukan, penguatan kebijakan hijau, efisiensi energi, dekarbonisasi transportasi, rehabilitasi lingkungan, dan edukasi publik.

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator antara lain pembangunan dan operasional sarana dan prasarana yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca, seperti TPS3R, Bank Sampah, dan SPALD-T. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu keterbatasan data potensi penurunan emisi dari sektor lain seperti pertanian, perhubungan, serta usaha dan/atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan rencana aksi melalui penambahan kegiatan mitigasi yang akan dihitung dalam aplikasi Aksara Bappenas, serta peningkatan sinergi antar instansi terkait. Selain itu, dukungan tenaga ahli dalam pengumpulan dan pengolahan data juga diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

2. Indikator Sasaran sebanyak 2 indikator dengan capaian sebagai berikut:

- a. Indikator dengan capaian sebesar 100%, tidak ada.
- b. Indikator Sasaran yang belum tercapai 100% sebanyak 2 indikator dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penurunan Emisi GRK (IUP) sebesar 63,23%
 - 2) Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebesar 98,13.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPRKPLH dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Indikator Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.8 - 2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					
			2025	2026	2027	2025	2026		ST	T	S	R	SR	
A. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)														
1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,22	3,33	3,44	0,80	0,85	25,39						V
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,37	96,43	96,49	96,70	96,70	100	V					
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,46	75,5	75,54	72,54	72,54	96,08	V					
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403.55	709.905,71	713.957,59	63,23					V	
5	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah	%	33,34	34,14	34,94	33,84	32,02	93,80	V					
6	Cakupan pelayanan persampahan	%	76,12	77,85	79,58	76,47	76,47	98,23	V					
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)														
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	78,50	79,00	79,5	85,67	85,67	100	V					
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,50	75,00	75,5	74,90	74,90	100	V					
3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	71,7	72,47	73,24	71,11	71,12	98,13	V					
4	Indeks Kualitas Air	Angka	74,17	74,27	74,37	74,71	74,71	100	V					
5	Indeks Kualitas Udara	Angka	85	85,01	85,02	77,23	77,23	90,85	V					
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO2eq	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403.55	709.905,71	713.957,59	63,23					V	
C. INDIKATOR PROGRAM														
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	V					

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
			2025	2026	2027	2025	2026		ST	T	S	R	SR
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	V				
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	V				
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,37	96,43	96,49	96,70	96,70	100	V				
5	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,8	48,81	48,82	48,80	48,80	100	V				
6	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	66,88	69,06	71,24	68,38	68,38	99,02	V				
7	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	79,93	80,03	80,14	78,79	78,79	98,45	V				
8	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	V				
9	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	V				
INDIKATOR PROGRAM													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
INDIKATOR PROGRAM													
1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,06	13,06	18,06	0,80	0,85	6,47					V
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	V				
3	Persentase jumlah TPS 3R	%	16,96	17,3	17,63	17,65	17,65	100	V				
INDIKATOR PROGRAM													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	0	0					V

	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
			2025	2026	2027	2025	2026		ST	T	S	R	SR
2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	85,71	100	100	V				
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,02	60,03	60,04	60,15	60,15	100	V				
4	Luas Lahan kritis tertangani	Ha	3,75	4	4,25	33,125	3,564	89,10		V			
5	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,08	7,4	7,71	7,08	7,08	95,72	V				
6	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	20,9	23,3	25,6	30,23	2,33	9,98					V
7	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7	15,7	15,7	15,7	0	0					V
8	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	74	80	85	81,70	81,70	100	V				
9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	20,00	20,00					V
10	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100	100	100	100	100	V				
11	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100	100	V				
12	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,26	30,93	31,6	30,80	30,80	99,58	V				
13	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	100	100	0	0					V
14	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	V				
15	Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah	%	33,34	34,14	34,94	33,84	32,02	93,80	V				
16	Persentase sampah yang terkelola	%	63,27	64,07	64,87	63,28	62,80	98,02	V				
17	Cakupan Pelayanan persampahan	%	76,12	77,85	79,58	76,47	76,47	98,23	V				

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d TW I 2026	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
			2025	2026	2027	2025	2026		ST	T	S	R	SR
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	V				
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	V				
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	V				

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/S/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
INDIKATOR IKK									
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	ST
2	Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (tetap)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (tetap)	%	48,8	48,81	48,82	0			

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/S/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	3.63%	3.57%	3.51%	11,66%	11,66%		
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	%	100%	100%	100%	-			
6	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%				100%	100%		
7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	63,27%	64,07%	64,87%	63,17%	63,17%		

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. NILAI IKM PERANGKAT DAERAH

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam Data Pokok Pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Nilai IKM dinyatakan dalam bentuk indeks dengan rentang skala 25 sampai dengan 100, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara berkala oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Pengumpulan data IKM dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang telah distandarkan, baik secara manual maupun elektronik, yang diisi oleh masyarakat sebagai responden. Survei ini dapat dilakukan secara triwulanan, semesteran, atau tahunan, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan. Unsur-unsur yang dinilai dalam pengukuran IKM meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, kualitas produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Setiap unsur diberikan nilai oleh responden, kemudian diolah dengan menghitung rata-rata nilai persepsi yang selanjutnya dikonversi menjadi nilai indeks.

Hasil penghitungan IKM diklasifikasikan ke dalam empat kategori mutu pelayanan, yaitu sangat baik dengan rentang nilai 88,31–100,00, baik dengan rentang 76,61–88,30, kurang

baik dengan rentang 65,00–76,60, dan tidak baik dengan rentang 25,00–64,99. Klasifikasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Nilai IKM yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek-aspek tertentu.

Sumber data IKM berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya dapat dikoordinasikan oleh bagian organisasi. IKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kepuasan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, pemanfaatan nilai IKM dalam Data Pokok Pembangunan berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks reformasi birokrasi, IKM menjadi salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik, termasuk dalam hal inovasi layanan, digitalisasi sistem pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan tidak hanya melakukan pengukuran IKM secara rutin, tetapi juga menindaklanjuti hasilnya melalui rencana aksi perbaikan yang konkret dan terukur guna mencapai pelayanan publik yang prima.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang

didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan. Kondisi sampai dengan tahun 2026 triwulan I, indikator tersebut dapat tercapai 100 dengan penjelasan sebagai berikut:

Faktor : Adanya layanan langsung kepada masyarakat
Pendorong yang dilaksanakan oleh DPRKPLH
Selanjutnya, dilaksanakan survei secara mandiri terkait kualitas pelayanan tersebut

Faktor : Keterbatasan sarana dan prasarana yang
Penghambat tersedia dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasana pengangkutan maupun kualitas bangunan sehingga berdampak pada kualitas dalam pelayanan

Upaya : Peningkatan kualitas layanan yang didukung
Tindaklanjut dengan sarana dan prasarana yang memadai

2. NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah merupakan salah satu indikator strategis dalam Data Pokok Pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah. AKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Penilaian AKIP menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented).

Nilai AKIP diperoleh melalui proses evaluasi yang dilakukan secara berkala, umumnya setiap tahun, oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian PANRB atau Inspektorat

Daerah. Evaluasi ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja. Setiap komponen dinilai berdasarkan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kualitas pelaporan kinerja yang disusun oleh perangkat daerah. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi pemerintah, hasil evaluasi internal, serta laporan kinerja tahunan. Capaian sampai dengan tahun 2026 triwulan I masih menggunakan data tahun 2025, hal ini disebabkan karena pada tahun 2026 masih dalam tahap penilaian. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : Kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen Pendorong dari pimpinan terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Faktor : Belum optimalnya tingkat pemahaman Penghambat seluruh ASN dalam penerapan dan komitmen terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Upaya : Peningkatan pemahaman seluruh ASN dalam Tindaklanjut pelaksanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3. PERSENTASE PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian fundamental dari upaya pemerintah dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung. Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman menjadi mandat

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berbagai regulasi turunannya, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, akses air minum, sanitasi, drainase, pengelolaan air limbah dan persampahan, penerangan jalan, ruang terbuka publik, dan prasarana lingkungan lainnya merupakan prasyarat utama untuk membangun kawasan hunian yang berkualitas. Keberadaan infrastruktur tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kenyamanan hidup, keteraturan tata ruang, serta pengurangan kawasan permukiman kumuh. Pada sisi lain, penyediaan infrastruktur permukiman juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan nilai lahan, hingga pengurangan risiko bencana.

Namun demikian, dinamika pertumbuhan penduduk, keterbatasan anggaran, perluasan kawasan permukiman informal, dan lemahnya kepatuhan pengembang terhadap kewajiban penyediaan PSU masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya backlog infrastruktur permukiman serta ketimpangan kualitas lingkungan antar wilayah. Sampai dengan tahun 2026 triwulan I, capaian indikator tersebut di atas sebesar 98,13% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--|
| Faktor Pendorong | a. Dukungan anggaran DAK Bidang Sanitasi untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti SPALD-S dan TPS 3R |
|------------------|--|

	b. Dukungan anggaran APBD dan CSR untuk kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025
	c. Layanan penyedotan Lumpur Tinja
Faktor Penghambat	a. Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik sehingga pembangunan infrastruktur dasar dalam bidang sanitasi masih bertumpu dengan anggaran DAK
	b. Layanan penyedotan Lumpur Tinja belum dapat Terjadwal (L2T3)
Upaya Tindaklanjut	a. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
	b. Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi
	c. Mengupayakan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

4. INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat

pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Tahun 2025 Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Capaian samapai dengan tahun 2026 triwulan I menggunakan hasil pengujian tahun 2025 dengan capaian sebesar 100% hal ini dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:

- Faktor : Tersedianya anggaran Uji Kualitas Air
- Pendorong Semester I dan II
- Faktor : Pengujian Kualitas Air direncanakan pada
- Penghambat akhir semester I
- Upaya : a. Melaksanakan kegiatan untuk
- Tindaklanjut Meningkatkan Kualitas Air Sungai dengan pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan
- b. Melaksanakan pemilihan lokasi sampling

5. INDEKS KUALITAS UDARA

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :
 - a. Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat)
 - b. Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - c. Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - d. Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - a. Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - b. Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- Ieu = 50%IndeksNO₂ + 50% IndeksSO₂ ,
- Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$.

Capaian sampai dengan tahun 2026 triwulan I masih menggunakan data tahun 2025, hal ini disebabkan karena proses pengujian belum dilaksanakan dengan capaian sebesar 90,85% dengan kategori sangat tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor	Sinergi dengan Kementerian LH dalam
Pendorong	Pengujian Kualitas Udara

Faktor Penghambat	Pengujian Kualitas Udara menunggu pelaksanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup
Upaya Tindaklanjuti	a. Melaksanakan kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Udara dengan pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan b. Melaksanakan pemilihan lokasi sampling

6. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang mendesak untuk ditangani, karena menyangkut masa depan bumi dan manusia. Laporan perdana Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yang terbit pada tahun 1990, memberikan bukti kuat bahwa aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Hal ini mendorong terbentuknya UNFCCC (1992), dimulainya Protokol Kyoto (1997), dan disepakatinya Paris Agreement (2015), yang menandai komitmen global menuju pada aksi iklim yang ambisius, bertahap dan terkoordinasi. Indonesia sendiri menunjukkan peran yang aktif, dimulai dari penyelenggaraan COP-13 di Bali (2007), penetapan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, Ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 hingga pada penyampaian dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang pertama kepada Sekretariat UNFCCC di November 2016. NDC Indonesia menjadi tonggak penting bagi transisi Indonesia menuju pada pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan penghidupan atas dampak krisis iklim.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya pada isu perubahan iklim, dan telah mengintegrasikan aksi mitigasi

perubahan iklim sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan diperkuat dalam perencanaan nasional jangka Panjang dan jangka menengah dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penurunan intensitas emisi GRK menuju pada Net Zero Emissions, adalah satu dari lima sasaran utama RPJPN 2025-2045.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari sektor energi, Proses Industri dan Penggunaan Produk, Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan lahan, Pengelolaan limbah. Sejalan dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Kabupaten Temanggung mengintegrasikan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Capaian sampai dengan tahun 2026 triwulan I capaian indikator tersebut di atas sebesar 63,23% atau dengan kategori Rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi capaian indikator antara lain:

Faktor Pendorong	Pembangunan dan Operasionalnya Sarpras yang berpotensi menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca seperti TPS3R, Bank Sampah, SPALD-T
Faktor Penghambat	Diperlukan penambahan data potensi Penurunan emisi dari Sektor lain seperti Pertanian, Perhubungan, Usaha dan atau/kegiatan
Upaya Tindaklanjut	Penambahan aksi mitigasi yang akan di hitung kedalam aplikasi "Aksara" Bappenas, Sinergitas antar OPD, Diperlukan Tenaga ahli dalam pengumpulan data sehingga target tercapai.

B. INDIKATOR PROGRAM

1. PERSENTASE RUSUNAWA YANG DIKELOLA DENGAN BAIK

Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus diupayakan oleh setiap penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah daerah.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan keterbatasan ruang untuk permukiman, maka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sangat sulit terpenuhi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejalan dengan hal tersebut, alternatif pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah susun sederhana sewa, dirasa sangat tepat karena dapat memberikan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebelum mampu memenuhi kebutuhan perumahan secara mandiri dan layak.

Namun, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal melalui Rusunawa tidak hanya diukur dari jumlah Rusunawa yang dibangun, melainkan juga dari kualitas pengelolaan yang menjamin terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, indikator persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik menjadi penting untuk memantau efektivitas penyediaan hunian layak bagi MBR dan kualitas layanan yang diberikan. Rusunawa yang dikelola dengan baik adalah Rusunawa yang memenuhi kriteria pengelolaan sesuai pedoman teknis, meliputi:

- a. Pengelolaan administratif dan keuangan yang tertib dan transparan;
- b. Pemeliharaan fisik bangunan yang baik dan layak huni;
- c. Ketersediaan layanan dasar (air bersih, listrik, sanitasi, keamanan);

- d. Partisipasi aktif penghuni dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan;
- e. Adanya unit pengelola yang memiliki kapasitas dan kompetensi memadai.

Tujuan dari pemantauan indikator Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah susun agar layak huni, aman, dan nyaman bagi penghuni;
- b. Mendorong efisiensi pengelolaan aset negara/daerah melalui sistem pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan;
- c. Menjamin keberlangsungan fungsi sosial Rusunawa sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. Mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Di Kabupaten Temanggung terdapat 6 Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui UPT Rusunawa DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu

1. Rusunawa Kranggan I
2. Rusunawa Kranggan II
3. Rusunawa Kertosari
4. Rusunawa Parakan Wetan
5. Rusunawa Parakan Kauman
6. Rusunawa Manggong Ngadirejo.

Capaian tahun 2026 dapat tercapai 100% dengan status capaian Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Faktor Pendorong | : | Keenam Rusunawa masih terhuni dan termanfaatkan, serta operasional Rusunawa, baik layanan listrik maupun air masih dapat terlaksana dan terkelola |
| Faktor Penghambat | : | Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan Rusunawa |

Upaya : Mengoptimalkan pemeliharaan dan perawatan
Tindaklanjut Rusunawa dengan alokasi anggaran yang ada
berdasarkan skala prioritas dan tingkat
kerusakan ringan

2. PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI (SPM)

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Capaian tahun 2026 triwulan I adalah 100% dengan status Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : Tidak ada korban bencana yang
Pendorong mengakibatkan relokasi

Faktor : Belum ada dukungan anggaran terkait rencana
Penghambat tindaklanjut apabila terjadi bencana

Upaya : Penyediaan lahan relokasi masing-masing
Tindaklanjut sebagai langkah mitigasi bencana pada area
rawan bencana dan dukungan dari pihak
Pemerintah Desa

3. PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI (SPM)

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan tahun 2026 triwulan I tercapai sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- Faktor Pendorong : Tidak ada program pemerintah daerah yang menyebabkan relokasi rumah
- Faktor Penghambat : Warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi serta kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah
- Upaya Tindaklanjut : -

4. **PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK**
 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Indikator ini menunjukkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Temanggung yang memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi fisik bangunan,

kecukupan ruang, maupun akses terhadap prasarana dasar. Indikator ini penting dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan perumahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Capaian indikator ini terus menunjukkan peningkatan, peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), serta peningkatan infrastruktur dasar permukiman. Selain itu terdapat sumber pendanaan lain diantaranya CSR, Bankeu Pemdes, APBDesa, Baznas dll.

Peningkatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Formulasi yang digunakan pada indikator ini adalah Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%. Capaian tahun 2026 sampai dengan triwulan I sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| Faktor Pendorong | : Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas |
| Faktor Penghambat | : Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil musrenbang dan usulan DPRD |

Upaya : Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi
Tindaklanjut pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa
Tengah, pendanaan APBN program BSPS,
bantuan CSR dan bantuan Baznas

5. PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH YANG TERTANGANI

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah utama di wilayah perkotaan dan perdesaan yang padat penduduk. Kawasan kumuh ditandai oleh kondisi fisik lingkungan yang tidak layak, bangunan yang padat dan tidak teratur, serta keterbatasan sarana dan prasarana dasar permukiman. Di Kabupaten Temanggung, fenomena kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan infrastruktur permukiman yang memadai. Terdapat kawasan tumbuh secara spontan tanpa perencanaan, sehingga menimbulkan permasalahan antara lain:

- a. Ketidakteraturan bangunan;
- b. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi;
- c. Sistem drainase yang buruk sehingga sering terjadi genangan;
- d. Kualitas jalan lingkungan yang rendah;
- e. Keterbatasan ruang publik dan pengelolaan sampah dan;
- f. Ketersediaan proteksi kebakaran.

Persentase Luas Kawasan Kumuh yang tertangani adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar luas kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani atau ditata ulang dibandingkan dengan total luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan di Kabupaten Temanggung. Penanganan kawasan kumuh mencakup berbagai kegiatan peningkatan kualitas permukiman agar memenuhi standar kelayakan huni. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, dan ruang terbuka hijau);

- b. Peremajaan kawasan, yaitu penataan ulang tata ruang dan bangunan agar lebih layak dan tertata;
- c. Pemukiman kembali (relokasi) bagi kawasan yang tidak memungkinkan untuk ditingkatkan kualitasnya karena keterbatasan ruang atau risiko bencana tinggi.

Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan tahun 2026 triwulan I sebesar 99,98% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong : a. Kondisi kekumuhan di Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori Kumuh sedang dan ringan

- b. Penanganan kumuh dari anggaran pusat dan provinsi untuk lokasi kawasan kumuh sesuai kewenangannya

Faktor Penghambat : Keterbatasan anggaran APBD dalam pembangunan infrastruktur kumuh dan pendanaan provinsi dan pusat terbatas pada lokasi prioritas yang lebih membutuhkan penanganan

Upaya Tindaklanjut : Mengusulkan kegiatan penanganan dari berbagai sumber anggaran

6. PERSENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Indikator Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki atau ditangani dibandingkan dengan total rumah tidak layak huni yang terdata di Kabupaten Temanggung. Rumah dikategorikan tidak layak huni (TLH) apabila tidak memenuhi kriteria:

- 1. Keselamatan bangunan,
- 2. Kecukupan luas minimum, dan
- 3. Kesehatan lingkungan serta akses terhadap sarana dasar (air bersih, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan pembuangan limbah).

Penanganan RTLH dilakukan di Kabupaten Temanggung melalui berbagai kegiatan:

1. Rehabilitasi atau perbaikan rumah,
2. Pembangunan baru bagi rumah yang tidak dapat diperbaiki,
3. Bantuan stimulan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),
4. Kolaborasi program daerah dan pusat.

Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan pembangunan perumahan di Indonesia, terutama di daerah perdesaan dan perkotaan padat penduduk. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah,
2. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan rumah layak,
3. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, dan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap standar rumah layak huni.

Pemerintah daerah bersama Pemerintah Pusat telah melaksanakan berbagai program penanganan RTLH melalui:

1. Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR,
2. Program Rehabilitasi RTLH melalui APBD Kabupaten Temanggung,
3. Program Penanganan RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
4. Program CSR dan partisipasi masyarakat (Gotong Royong Bedah Rumah).

Formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus jumlah akumulasi penanganan RTLH dari tahun 2021-2026 dibagi jumlah RTLH Tahun 2020 dikalikan 100%. Capaian sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 99,02% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong	: Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
Faktor Penghambat	: Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil Musrenbang dan usulan DPRD
Upaya Tindaklanjuti	: Melalui meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas

7. PERSENTASE KEPEMILIKAN RUMAH TERHADAP JUMLAH KEPALA KELUARGA

Faktor Pendorong	: Kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni secara mandiri dan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni oleh pemda, swasta/CSR
Faktor Penghambat	: Keterbatasan kemampuan keuangan untuk penyediaan rumah layak huni bagi keluarga baru
Upaya Tindaklanjuti	: mendukung pengembang perumahan dalam menyelenggarakan rumah umum dan subsidi serta dengan mengusulkan program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni melalui berbagai sumber anggaran

8. PERSENTASE REFORMA AGRARIA YANG DIFASILITASI

Reforma Agraria merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis lahan.

Fasilitasi Reforma Agraria di Kabupaten Temanggung meliputi kegiatan legalisasi aset melalui redistribusi tanah dan sertifikasi tanah masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat di lokasi-lokasi prioritas Reforma Agraria. Upaya tersebut dilaksanakan secara kolaboratif melalui peran aktif Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Temanggung, yang berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lintas sektor, termasuk penyelesaian konflik agraria dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Temanggung diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi pedesaan, menekan ketimpangan penguasaan lahan, serta mewujudkan pembangunan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reforma agraria dibagi jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n dikalikan 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---|---|
| Faktor | : | Koordinasi lintas sektor terkait dengan reforma |
| Pendorong | : | agraria yang difasilitasi di Kabupaten Temanggung |
| Faktor | : | Kurang pahamnya masyarakat tentang reforma |
| Penghambat | : | agraria |

Upaya : Sosialisasi kepada masyarakat
Tindaklanjut

9. PERSENTASE TERFASILITASINYA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memfasilitasi berbagai kegiatan pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, persampahan dan infrastruktur dasar lainnya. Kegiatan fasilitasi pengadaan tanah dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah, instansi yang memerlukan tanah (user), serta masyarakat pemilik lahan. Melalui pendekatan partisipatif dan komunikasi yang transparan, proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih efektif dan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak masyarakat sehingga dapat meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Temanggung berperan aktif dalam:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan dan kebutuhan tanah, termasuk penetapan lokasi pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah.
2. Melakukan pendampingan administrasi dan teknis bagi instansi pelaksana pengadaan tanah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya).
3. Memfasilitasi proses musyawarah dengan masyarakat, terutama dalam tahapan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah serta penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian.

4. Mengupayakan percepatan penyelesaian kendala di lapangan, seperti tumpang tindih kepemilikan atau keberatan terhadap hasil penilaian.

Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong	: Adanya koordinasi lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Temanggung
Faktor Penghambat	: Perbedaan persepsi terhadap nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah sehingga kesulitan mendapat kesepakatan harga ganti rugi
Upaya Tindaklanjut	: Sosialisasi dan mediasi sejak awal program kepada masyarakat

10. CAKUPAN RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebagai sarana mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang aman dan lumpur tinja telah disedot dan diolah di IPLT. Selain itu, akses sanitasi aman juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait air bersih dan sanitasi yang layak, aman, berkelanjutan. Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 6,47% dengan kategori Sangat Rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong	: Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT
Faktor Penghambat	: a. Minimnya kepemilikan akses sanitasi layak sesuai SNI; b. Akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap)

sehingga belum adanya kebutuhan dan kesadaran dari masyarakat terkait permohonan penyedotan.

- c. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap akses sanitasi aman masih terbatas.

Upaya : Pengusulan kegiatan penyediaan/
Tindaklanjut pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi

11. PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPM)

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemaran, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n) dibagi Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun (n) dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian

indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- Faktor : a. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI
- Pendorong : b. Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT
- Faktor : Keterbatasan anggaran APBD dalam
- Penghambat : penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik serta akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap) sehingga belum muncul kebutuhan/kesadaran penyedotan pada masyarakat
- Upaya : Pengusulan kegiatan penyediaan/
- Tindaklanjut : pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi

12. PERSENTASE JUMLAH TPS 3R

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan. TPS 3R harus memenuhi persyaratan:

- 1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- 2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- 3) Lokasinya mudah diakses;
- 4) Tidak mencemari lingkungan; dan

5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paradigma lama pengelolaan sampah dengan metode kumpul-angkut-buang menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang masuk ke TPA sehingga TPA kelebihan kapasitas (over capacity). Hal ini tentunya berdampak buruk bagi lingkungan yang berujung pada masalah kesehatan di Masyarakat. Maka dari itu paradigma pengelolaan sampah yang baru diganti menjadi kumpul-pilah-olah-angkut. Dengan paradigma baru ini pengelolaan sampah dari hulu ke hilir tidak akan bisa lepas dari fasilitas pengelolaan sampah, salah satunya adalah TPS 3R yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah dari rumah tangga untuk dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah sehingga dihasilkan sampah residu yang akan diangkut ke TPA. Formulasi perhitungan yang digunakan untuk indikator Persentase jumlah TPS 3R dapat dihitung dengan rumus perhitungan berikut ini Jumlah unit TPS 3R dibagi dengan total jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong : Jumlah fasilitas pengolah sampah seperti TPS 3R dan Bank Sampah yang bertambah menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah. Selain itu meningkatnya jumlah sampah yang dapat dikelola di setiap fasilitas juga menambah jumlah capaian.

Faktor Penghambat : fasilitas yang tidak melakukan pengolahan secara optimal sehingga sebagian besar sampah yang masuk harus diangkut ke TPA, selain itu terdapat beberapa fasilitas yang tidak melakukan pelaporan pengelolaan sampahnya sehingga data tidak masuk dalam capaian

Upaya : Melakukan monitoring secara rutin terhadap Tindaklanjut fasilitas pengolahan sampah untuk memastikan keberfungsian fasilitas serta pembaharuan data pengelolaan sampah di setiap fasilitas. Selain itu, dilakukan fasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah guna meningkatkan jumlah fasilitas, sehingga kapasitas dan volume sampah yang dapat diolah juga meningkat

13. PERSENTASE DOKUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan Dokumen yang memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Formulasi yang digunakan pada indikator tersebut di atas adalah jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dibagi jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 0 dengan kategori Sangat Rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : Tersusunnya Dokumen SLHD Kabupaten Pendorong Temanggung Tahun 2026
 Faktor : Ketersediaan dan kelengkapan data dukung Penghambat penyusunan dokumen SLHD belum dapat terpenuhi secara maksimal
 Upaya : Melakukan koordinasi dengan Perangkat Tindaklanjut Daerah terkait, Tim Teknis, Tenaga Ahli Penyusun Dokumen SLHD, DLHK Provinsi

14. PERSENTASE PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN
KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Amdal. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL UPL. Sebelum terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 Izin Lingkungan yang dikeluarkan merupakan persetujuan rekomendasi sedangkan setelah terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 persetujuan lingkungan yang dikeluarkan adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah persetujuan UKL UPL, AMDAL, DPLH dan DELH yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan/usaha yang mengajukan persetujuan dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong	: Telah diterbitkannya 16 (enam belas) persetujuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha
Faktor Penghambat	: Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko yang membutuhkan penyesuaian dalam regulasi dan pelaksanaan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan.

- Upaya : 1. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian
Tindaklanjut Lingkungan Hidup/BPLH, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP, DPUPR, Dinhub Kabupaten Temanggung
2. Kabupaten Temanggung telah memiliki Tim Uji Kelayakan (TUK) sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup 2095 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang Berkedudukan di Kabupaten Temanggung.

15. INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kondisi dan kemampuan lahan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya. Tujuan utama penghitungan IKL adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan lahan, mengidentifikasi potensi degradasi, serta menjadi dasar dalam perencanaan pengelolaan dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah mengintegrasikan hasil penilaian kualitas tutupan lahan dengan faktor-faktor penyesuaian yang relevan secara proporsional terhadap luas wilayah. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- Faktor : adanya potensi penambahan nilai IKL dari
Pendorong Deliniasi Ruang Terbuka Hijau/RTH di Kabupaten Temanggung meskipun koefisien perhitungannya relatif kecil yakni 0,005

Faktor Penghambat	: Perhitungan menggunakan proyeksi Citra Satelit sehingga sangat dimungkinkan ada penurunan luasan Tutupan Lahan sehingga nilai IKL menurun drastis
Upaya Tindaklanjut	: 1. Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa 2. Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi."

16. LUAS LAHAN KRITIS TERTANGANI

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah Luas lahan kritis tertangani dalam Ha pada tahun-n. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 89,10% dengan kategori Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong	: Persediaan bibit dari tahun sebelumnya masih cukup untuk melayani permohonan dari masyarakat dan didukung dengan adanya CSR bibit tanaman dari pihak swasta.
Faktor Penghambat	: Stok bibit tanaman yang tersedia jenisnya terbatas sehingga permohonan dari masyarakat untuk kegiatan penanaman tidak dapat diakomodir secara maksimal.

- Upaya : 1. Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa
- Tindaklanjut 2. Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi
3. Melakukan Kerjasama dengan instansi/Lembaga lain yang memiliki visi sama terkait konservasi dan memiliki program CSR yang langsung ditunjukkan kepada masyarakat.

17. PERSENTASE SUMBER MATA AIR YANG DILINDUNGI DAN DIKELOLA

Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap ketersediaan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan, baik karena posisinya yang berada di hulu DAS, maupun karena struktur tanah dan batuan. Ketersediaan ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Mengingat apa yang terjadi di wilayah hulu akan sangat berdampak bagi wilayah-wilayah di bawahnya, maka perlu ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber air tersebut. Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber air ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah sumber mata air yang dilindungi dan dikelola dibagi jumlah sumber mata air yang teridentifikasi sementara (basis data 2025) dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 95,72% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- Faktor : Beberapa mata air digunakan sebagai sumber
- Pendorong air baku PDAM dan PAMSIMAS, sehingga mata air sudah dikelola oleh beberapa pihak.

Faktor Penghambat	: Belum ada kegiatan inventarisasi mata air yang terupdate.
Upaya Tindaklanjuti	: 1. Penanaman pohon keras, tegakan, dan tanaman bernilai ekonomi di kawasan lereng Sumbing, Sindoro, dan Prau untuk menambah tutupan lahan dan mengurangi lahan kritis; 2. Mengupayakan pembangunan konservasi secara sipil teknis; 3. Budidaya tanaman semusim dengan tanaman keras, sehingga fungsi produksi tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi konservasi; 4. Pengendalian alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian; 5. Mengajak partisipasi aktif dari masyarakat agar ikut serta dalam perlindungan mata air; 6. Penguatan data terkait mata air, sehingga program perlindungan dan pengelolaan mata air dapat lebih terarah dan terukur.

18. PERSENTASE TITIK PEMANTAUAN KUALITAS AIR PERMUKAAN DI KAB TEMANGGUNG

Pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Parameter pengujian kualitas air permukaan dan air limbah (10 param- pH

- Konduktivitas
- Suhu
- Chemical Oxygen Demand (COD)
- Biological Oxygen Demand (BOD)
- NH3 (Amonia)

- Total Suspended Solids (TSS)
- Total Dissolved Solids (TDS)
- Total fosfat
- Sulfidaeter):

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah Jumlah titik pemantauan yang terpantau dibagi Jumlah titik target pemantuan dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 9,98 % dengan kategori Sangat Rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong	: Pelaksanaan pengambilan contoh uji dilaksanakan sesuai jadwal
Faktor Penghambat	: Jadwal pelaksanaan pemantauan kualitas air dilakukan dua kali pada musim kemarau (April, Mei dan Juli) dan musim penghujan (September dan Oktober)
Upaya Tindaklanjut	: Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan

19. PERSENTASE TITIK PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN DI KAB TEMANGGUNG

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah titik pantau kualitas air yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah target titik pantau kualitas air di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 9,98 % dengan kategori Sangat Rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong	: Pelaksanaan pengambilan contoh uji dilaksanakan sesuai jadwal
Faktor Penghambat	: Jadwal pelaksanaan pemantauan kualitas air dilakukan dua kali pada musim kemarau

(April, Mei dan Juli) dan musim penghujan
(September dan Oktober)

Upaya : Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai
Tindaklanjut jadwal yang telah direncanakan

20. PERSENTASE RTH PUBLIK KABUPATEN YANG TERPELIHARA

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dengan target capaian adalah Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara dibagi luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung diaklikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : Dukungan anggaran dan SDM dalam
Pendorong pengelolaan RTH milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sehingga dapat dilaksanakannya pemeliharaan RTH milik pemerintah daerah secara rutin

Faktor : 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana
Penghambat perlengkapan pemeliharaan taman dan pemeliharaan pohon ayoman
2. Berkurangnya SDM Pertamanan dikarenakan pensiun dan tidak ada pengganti sehingga mengakibatkan adanya lokasi-lokasi yang tidak terjangkau dalam kegiatan pemeliharaan secara rutin.

Upaya : Memberlakukan sistem Tim Kerja dalam
Tindaklanjut pelaksanaan tugas agar pemeliharaan RTH

milik pemerintah daerah tetap berjalan optimal.

21. PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA/KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%

Capaian

indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 20,00 % dengan kategori Sangat Rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : 1. Metode pengawasan dilakukan secara Pendorong langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku.

2. Adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat."

Faktor : 1. Masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghambat

2. Adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.

Upaya : Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi
Tindaklanjut kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan
terkait pembaruan peraturan yang terbit
terkait pengelolaan lingkungan hidup

22. PERSENTASE PEMBINAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENCEMARAN AIR

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dibagi usaha dan/atau yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang termasuk pada target kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : Metode pengawasan dilakukan secara
Pendorong langsung maupun tidak langsung sesuai
peraturan yang berlaku serta adanya
pengawasan bersama baik dengan pemerintah
provinsi maupun pemerintah Pusat

Faktor : Kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha
Penghambat dan/atau kegiatan dalam pengelolaan
lingkungan hidup serta adanya pembaruan
Instrumen peraturan perundang-undangan di

bidang Pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah

Upaya : Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi
Tindaklanjut kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup

23. PERSENTASE PEMBINAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENCEMARAN UDARA

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dibagi usaha dan/atau yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang termasuk pada target kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : Metode pengawasan dilakukan secara
Pendorong langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku serta adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Pusat

Faktor : Kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha
 Penghambat dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kendala lain yaitu adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah

Upaya : Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi
 Tindaklanjut kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup

24. PERSENTASE SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi total sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikali 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 99,58 dengan kategori

Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Faktor Pendorong | : | Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan |
| Faktor Penghambat | : | Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata |
| Upaya Tindaklanjut | : | <ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi akhir 12 Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dilakukan pada bulan Juni 20262. Memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata3. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah. |

25. PERSENTASE PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru

(Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklamasi (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperoleh dibagi jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 0 dengan kategori Sangat Rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---|
| Faktor Pendorong | : Usulan Penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang sudah diajukan sampai dengan triwulan I tahun 2026: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan Kalpataru 2. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung |
| Faktor Penghambat | : 1. Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun |
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun |
| Upaya Tindaklanjut | : 1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup lainnya baik tingkat provinsi maupun nasional |
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup 3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan 5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan |

26. PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI

Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 100 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Faktor Pendorong | : | 1. Adanya sikap kooperatif dan pemantauan bersama dampak lingkungan hidup baik dari pemrakarsa usaha, masyarakat dan OPD terkait |
| | | 2. Penyelesaian aduan masyarakat secara musyawarah antara pihak pengadu dengan pihak yang diadukan melalui fasilitasi Pemerintah Desa" |
| Faktor Penghambat | : | 1. Masih kurangnya kesadaran atau empati masyarakat atau pemrakarsa usaha akan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dampaknya mengganggu masyarakat sekitar. |
| | | 2. Adanya aduan masyarakat yang berasal dari dampak kegiatan usaha kecil atau konflik sosial di masyarakat sehingga penanganannya tidak dapat menggunakan |

instrumen peraturan lingkungan hidup dan penanganannya melalui pendekatan sosial."

Upaya : Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi
Tindaklanjut kepada masyarakat dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

27. TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DIFASILITAS PENGOLAH SAMPAH

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah adalah jumlah sampah, baik organik maupun anorganik, yang telah diproses atau diolah di fasilitas seperti TPS3R, pengomposan, atau daur ulang, sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Fasilitas ini memilah dan mengolah sampah menjadi produk lain, seperti kompos atau bahan daur ulang, sehingga mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA.

Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah jumlah sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dibagi jumlah total timbulan sampah dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 93,80 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor : Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah
Pendorong seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada

Faktor : 1. Terdapat beberapa TPS3R yang tidak
Penghambat berfungsi optimal
2. Terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya

Upaya : 1. Monitoring dan evaluasi keberfungsian
Tindaklanjut TPS3R dan TPSD
2. Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah"

28. PERSENTASE SAMPAH YANG TERKELOLA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu Jumlah sampah terkelola dibagi jumlah total timbulan sampah dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 98,02 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| Faktor Pendorong | : Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada |
| Faktor Penghambat | : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana juga sumber daya manusia pengelolaan sampah baik dari Pemda maupun Desa menyebabkan pelayanan pengumpulan, |

pengolahan dan pengangkutan sampah tidak berjalan dengan optimal.

2. Akses yang sulit dijangkau dengan armada persampahan ke beberapa wilayah di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu faktor pengelolaan sampah khususnya pengangkutan belum bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Upaya : 1. Monitoring dan evaluasi keberfungsian
Tindaklanjut TPS3R dan TPSD

2. Sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber
3. Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah
4. Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah

29. CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta pihak swasta. Persentase pelayanan persampahan merupakan proporsi wilayah desa dan kelurahan yang telah terjangkau layanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta

terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung. Capaian indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 98,23 dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong : Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa, terutama pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA

Faktor Penghambat : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
2. Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,
3. Belum semua desa mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
4. Jarak antara desa dengan TPA yang jauh
5. Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

Upaya Tindaklanjut : Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah

C. INDIKATOR SPM

1. Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan

Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Persentase Warga Negara Korban Bencana
yang Memperoleh Rumah Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani (unit)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena bencana (unit)	0	0	0	0	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Data tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 tidak ada rumah kena bencana yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%.

Faktor pendorong terkait capaian indikator ini adalah penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana dan dukungan dari pihak Pemerintah Desa.

2. Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah

daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Persentase warga negara yang terkena relokasi
akibat program pemerintah daerah yang memperoleh
fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah relokasi yang tertangani (unit)	0	0	24	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena relokasi (unit)	0	0	24	0	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Untuk capaian tahun 2024-2026 tidak ada kegiatan relokasi program pemerintah sehingga capaian sebesar 100%. Penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah diusulkan melalui program RUSPIN yang ada pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah selain itu dengan meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian PUPR, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi sedangkan masih terdapat sebagian warga belum memiliki

tanah untuk relokasi rumah. Selain itu kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.

Indikator persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni merupakan dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Warga Negara yang terdampak akibat adanya Program Pemerintah sehingga dapat meminimalkan dampak sosial masyarakat untuk kelancaran Program Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi serta kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.

3. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n) dibagi Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun (n) dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator tersebut di atas dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Persentase Warga Negara yang Memperoleh
Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n)	Na	Na	811.798	820.736	822.880	822.880
2	Jumlah total warga Negara yang harus dilayani di tahun n	Na	Na	811.798	820.73	822.880	822.880
3	Persentase (%)	Na	Na	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas data belum dapat tertuang secara menyeluruh dari tahun 2021 hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan rumus yang digunakan. Kondisi sampai dengan tahun 2026 secara persentase capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan jumlah jiwa di seluruh daerah Kabupaten Temanggung sejumlah 822.880 jiwa. Faktor pendorong dari capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI
- b. Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik serta akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap) sehingga belum muncul kebutuhan/kesadaran

penyedotan pada masyarakat. Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain melalui pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Faktor pendorong :

- a. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI
- b. Layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT

Faktor penghambat:

- a. Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
- b. Kondisi sarana sanitasi masyarakat masih didominasi oleh tangki septik yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak kedap air, sehingga kesadaran serta kebutuhan masyarakat untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala masih rendah

Rekomendasi tindaklanjut:

Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi

2. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani

Faktor pendorong:

- a. Berdasarkan tingkat kekumuhannya, kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung tergolong dalam kategori kumuh sedang dan kumuh ringan

- b. Penanganan kawasan permukiman kumuh didukung melalui pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Faktor penghambat:

Keterbatasan alokasi APBD serta terbatasnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang masih difokuskan pada lokasi prioritas, menjadi kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh

Rekomendasi tindaklanjut:

Mengusulkan kegiatan penanganan dari berbagai sumber anggaran

3. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Faktor pendorong:

- a. Penanganan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD
- b. Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui pendanaan APBN program BSPS
- c. Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui bantuan CSR dan bantuan Baznas
- d. Mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Faktor penghambat:

Keterbatasan APBD dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menyebabkan pelaksanaan program masih bergantung pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan usulan DPRD

Rekomendasi tindaklanjut:

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas

4. Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Faktor pendorong:

Adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), sehingga program dapat segera dilaksanakan apabila terdapat perumahan MBR atau perumahan subsidi yang memenuhi kriteria

Faktor penghambat:

Belum terdapat perumahan MBR atau perumahan subsidi di Kabupaten Temanggung yang memenuhi kriteria sebagai lokasi penerima program penyediaan PSU

Rekomendasi tindak lanjut :

5. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Faktor pendorong:

Adanya koordinasi lintas sektor

Faktor penghambat:

Rekomendasi tindak lanjut:

Sosialisasi dan mediasi sejak awal program

6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Faktor pendorong:

Adanya koordinasi lintas sektor

Faktor penghambat:

Ketidakpahaman masyarakat

Rekomendasi tindak lanjut:

Sosialisasi dan mediasi sejak awal program

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten

Faktor pendorong:

Sinergi dengan Kementerian LH dalam Pengujian Kualitas Udara

Faktor penghambat:

Perubahan Regulasi tentang IKLH menurunkan hasil indeks Kualitas Udara

Rekomendasi tindak lanjut:

Melaksanakan kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai dengan pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan

8. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten

Faktor pendorong:

- a. Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R
- b. Meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada

Faktor penghambat:

- a. Terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional persampahan

Rekomendasi tindak lanjut:

- a. Monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD
- b. Sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber
- c. Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah
- d. Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRKPLH

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPRKPLH dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPRKPLH dari 35 indikator terdapat 18 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (25,39%)

Hal ini disebabkan karena capaian cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2026 masih sama dengan tahun 2025 karena progres fisik belum tercapai.

- Indikator Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman (98,13%)

Hal ini disebabkan karena Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik sehingga pembangunan insfrastruktur dasar dalam bidang sanitasi masih bertumpu dengan anggaran DAK. Serta Layanan penyedotan Lumpur Tinja belum dapat Terjadwal (L2T3).

- Indikator Persentase penanganan rumah tidak layak huni (96,70%)

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil musrenbang dan usulan DPRD.

- Indikator Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (98,45%)

Hal ini disebabkan oleh kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni secara mandiri.

- Indikator Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (6,47%)

Hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan sesuai ketentuan Bappenas pada hasil analisis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

- Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (96,08%)
Hal ini disebabkan Perubahan Regulasi tentang IKLH menurunkan hasil indeks Kualitas Udara.
- Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (63,23%)
Hal ini disebabkan oleh perlunya penambahan data potensi Penurunan emisi dari Sektor lain seperti Pertanian, Perhubungan, Usaha dan atau/kegiatan.
- Indikator timbunan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah (93,80%)
Hal ini disebabkan oleh TPS3R belum berfungsi secara optimal dan terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya.
- Indikator cakupan pelayanan persampahan (98,23%)
Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis sebagian wilayah Kabupaten Temanggung yang relatif jauh dan memiliki karakteristik medan yang beragam menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pelayanan persampahan, khususnya dalam akses dan pengangkutan sampah. Kondisi tersebut diperberat dengan masih terbatasnya ketersediaan dan kapasitas sarana serta fasilitas pengelolaan sampah, sehingga diperlukan penguatan sarana prasarana dan optimalisasi sistem pelayanan persampahan secara bertahap dan berkelanjutan.
- Indikator Indeks Kualitas Udara (90,85%)
Hal ini disebabkan oleh Pengujian Kualitas Udara menunggu pelaksanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- Indikator Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (0%)
Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa data yang belum terupdate dan belum lengkap.
- Indikator Luas Lahan kritis tertangani (89,10%)
Hal ini disebabkan oleh stok bibit tanaman yang tersedia jenisnya terbatas sehingga permohonan dari masyarakat untuk kegiatan penanaman tidak dapat diakomodir secara maksimal.

- Indikator persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (95,72%)

Hal ini disebabkan oleh belum ada kegiatan inventarisasi mata air yang terupdate.

- Indikator persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung (9,98%)

Hal ini disebabkan oleh jadwal pelaksanaan pemantauan kualitas air dilakukan dua kali pada musim kemarau (April, Mei dan Juli) dan musim penghujan (September dan Oktober).

- Indikator persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (0%)

Hal ini disebabkan oleh jadwal pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilakukan dua kali pada musim kemarau (bulan Juni) dan musim penghujan (bulan November).

- Indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (20,00%)

Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Serta adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.

- Indikator persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (0%)

Hal ini disebabkan informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun dan adanya beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan setiap tahun.

- Indikator Persentase sampah yang terkelola (62,80%)

Hal ini disebabkan oleh beberapa TPS3R yang tidak berfungsi optimal dan terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH, antara lain :

- Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung
- Terdapat backlog perumahan

- Belum adanya acuan pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh
- Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung
- Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian tanah obyek reforma agraria (TORA)
- Rendahnya akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Temanggung
- Belum optimalnya pendampingan peningkatan PSU perdesaan dan perkotaan
- Belum adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penunjang kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (ASN, Non ASN, TFL, KSM, Perangkat Desa, dll)
- Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi) dan Perumahan Rakyat
- Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman
- Kemudahan investasi
- Pengelolaan RTH Perkotaan
- Indeks kualitas lingkungan hidup
- Luasan lahan kritis
- Emisi gas rumah kaca (GRK)
- Pelestarian sumber mata air
- Pengelolaan sampah yang belum optimal
- Kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan persampahan
- Rendahnya tingkat pengurangan sampah dari sumbernya
- Pelayanan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa yang belum optimal
- Belum optimalnya tata kelola Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Daerah
- Kelayakan Infrastruktur prasarana, sarana, dan utilitas umum Rusunawa
- Belum ada Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi di Kabupaten Temanggung

- Capaian sanitasi aman yang masih jauh dari target
 - Belum tersedianya temporary landfill pada saat pembangunan TPST
 - Belum tersedianya tenaga operasional terlatih pada TPST
 - Belum optimalnya operasional pengelolaan sampah residu di TPST
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:

- Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang menjadi mendukung capaian sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik serta mendukung misi kepala daerah yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, sehingga diperlukan upaya yang terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi, khususnya infrastruktur hilir seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) agar dapat berfungsi secara optimal, serta penguatan kelembagaan pengelola sanitasi guna menjamin keberlanjutan layanan sanitasi yang aman. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian program dan target nasional di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat, termasuk dalam mendukung percepatan pencegahan dan penanganan stunting.

- Peningkatan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
- Peningkatan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak menjadi salah satu prioritas dalam mendukung capaian sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik serta mendukung misi kepala daerah yaitu meningkatkan konektivitas

dan aksesibilitas. Upaya tersebut dilaksanakan secara terarah melalui penyediaan, peningkatan kualitas, dan penanganan rumah tidak layak huni, serta peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Hal ini sekaligus mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator dalam pencapaian tujuan daerah, yaitu mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik, dan memiliki rasa aman. Serta mendukung misi Kepala Daerah yaitu Mempromosikan Kelestarian Lingkungan. Capaian IKLH menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terarah dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung kelestarian lingkungan dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim. Pencapaian indikator tersebut memerlukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengurangan emisi dari berbagai sektor, antara lain energi, transportasi, persampahan, pertanian, dan kehutanan, serta peningkatan kapasitas penyerapan emisi melalui

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya tersebut sekaligus merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pencapaian target nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon. Serta berkontribusi dalam pencapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Regional maupun Nasional.

- **Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah**

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan melalui peningkatan kapasitas dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peningkatan timbulan sampah yang terolah juga merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memperkuat Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) serta mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengolahan sampah dari sumbernya.

- **Cakupan pelayanan persampahan**

Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang beragam serta keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang telah mengalami overload menjadi tantangan dalam pencapaian target pelayanan persampahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana persampahan yang memadai, peningkatan efektivitas pelayanan, serta penguatan pengelolaan persampahan secara terpadu dan berkelanjutan. Indikator cakupan pelayanan persampahan merupakan salah satu indikator kinerja

daerah yang menjadi target Kepala Daerah, sehingga pencapaiannya perlu didukung melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang terarah dan berkelanjutan.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPRKPLH, antara lain :

A. Tantangan

- **Perumahan dan kawasan permukiman**

Belum optimalnya data dan dokumen perencanaan sebagai acuan pemerintah dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman, penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan PSU, serta pengelolaan 6 (enam) unit Rusunawa bagi MBR.

- **Sanitasi:**

Masih perlunya peningkatan akses sanitasi aman, optimalisasi IPLT dan LLTT, serta penguatan kelembagaan pengelola sanitasi.

- **Persampahan:**

Kondisi geografis yang beragam, keterbatasan kapasitas TPA yang telah *overload*, kondisi sarana dan prasarana persampahan yang kurang memadai serta belum optimalnya pengolahan sampah dan pengelolaan berbasis masyarakat.

- **Lingkungan hidup:**

Peningkatan IKLH, optimalisasi pengelolaan RTH publik, penanganan lahan kritis, pengendalian pencemaran, serta penurunan emisi GRK masih memerlukan upaya yang berkelanjutan.

- **Pembinaan dan pengawasan lingkungan:**

Cakupan kegiatan usaha yang luas dan masih perlunya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

- **Pendukung pelayanan:**

Pemutakhiran data, peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana prasarana, serta pemeliharaan Laboratorium Lingkungan terakreditasi dan koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat.

B. Peluang

- **Perumahan dan permukiman:**

Adanya dukungan program nasional, dukungan anggaran, optimalisasi Rusunawa, serta peluang sinergi dengan pemerintah desa, pengembang, dan pemangku kepentingan dalam penyediaan hunian layak dan PSU.

- **Sanitasi:**

Dukungan program nasional dan optimalisasi IPLT serta LLTT untuk meningkatkan akses sanitasi aman dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

- **Persampahan:**

Pengembangan TPS3R, bank sampah, pengolahan sampah dari sumber, dan penerapan ekonomi sirkular untuk mengurangi beban TPA.

- **Lingkungan hidup:**

Optimalisasi RTH publik, rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan data kualitas lingkungan, serta dukungan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim.

- **Pembinaan dan pengawasan:**

Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan terakreditasi dan teknologi informasi untuk mendukung pengujian, pemantauan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha.

- **Pendukung pelayanan:**

Peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi data dan pelayanan, serta peluang dukungan pendanaan dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

5. Formulasi isu-isu penting

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup, isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun 2027 meliputi:

- a. Peningkatan kualitas kawasan perkotaan melalui rehabilitasi dan penataan kawasan Alun-Alun Kota Temanggung yang meliputi

kawasan alun-alun serta Segmen A, B, dan C Pendopo Pengayoman.

- b. Penguatan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan Dokumen Evaluasi RPPLH sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- c. Optimalisasi pengelolaan RTH publik melalui penataan dan pemeliharaan RTH publik DPRKPLH dalam rangka mendukung gerakan DPRKPLH ASRI serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
- d. Peningkatan akses sanitasi aman melalui pembangunan 150 unit SPALDS, pembangunan 12 unit jambanisasi, serta penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagai dasar pengembangan sistem sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan akses hunian layak melalui pembangunan/penanganan 87 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka meningkatkan kualitas hunian dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- f. Peningkatan pengelolaan persampahan melalui pembangunan TPST, pengadaan sarana dan prasarana persampahan, serta pembangunan Depo Transfer guna meningkatkan kapasitas pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- g. Peningkatan kualitas pengelolaan TPA melalui upaya penghentian proses open dumping di TPA Sanggrahan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih aman dan sesuai ketentuan.
- h. Penguatan pelayanan pengujian dan pemantauan lingkungan hidup melalui optimalisasi Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi untuk mendukung ketersediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 14
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
	Perbaikan rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH	Program Kawasan Permukiman
Lingkungan Hidup			
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah	DPRKPLH	Program Pengelolaan Persampahan

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 yang sesuai dengan kewenangan DPRKPLH dengan rincian sebagai berikut:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan kegiatan perbaikan rumah tidak layak

huni terdiri dari 13 usulan. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 5 usulan yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah.

Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 urusan lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan sampah terdiri atas 2 (dua) usulan. Berdasarkan hasil verifikasi, kedua usulan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sehingga layak untuk dipertimbangkan masuk dalam Renja Tahun 2027. Adapun lokasi usulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan peralatan penunjang TPS (Dusun Bajangan Desa Mandisari Kecamatan Parakan
- b. Pengadaan peralatan penunjang TPS (Dusun Salam Desa Salamsari Kecamatan Kedu)

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal DPRKPLH.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.15
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
A.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung				
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat			
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	250	Rumah Tangga	2.509.961.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
A.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung					
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	250	Rumah Tangga	2.509.961.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	1.500.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	1.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	1.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	1.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang akan menerima gaji dan tunjangan ASN	136	orang/bulan	12.482.516.992		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang akan menerima gaji dan tunjangan ASN	136	orang/bulan	12.482.516.992	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	84.500.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	84.500.000	
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD	12	Laporan					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD	12	Laporan		
			Jumlah paket bahan logistik kantor	12	Paket					Jumlah paket bahan logistik kantor	12	Paket		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket		

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/P enerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	5.000.000		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Pe nerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	17.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	17.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	15.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	19.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	19.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	28.500.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	28.500.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	30.000.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	30.000.000	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.000.000				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	30.000.000		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	15.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.425.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.425.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5.173.617.026		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5.173.617.026	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	85.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	85.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	65.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	65.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12	Unit	11.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12	Unit	11.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direh abilitasi					Kantor atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direh abilitasi				
B	Program Pengembangan Perumahan						B	Program Pengembangan Perumahan						
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokume n	10.000.000		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Dokume n	10.000.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokume n	10.000.000		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokume n	10.000.000	
2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	72	Dokume n	400.000.000	2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	72	Dokume n	400.000.000	
C	Program Kawasan Permukiman						C	Program Kawasan Permukiman						
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160	Unit Rumah	175.000.000		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160	Unit Rumah	175.000.000	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak	0	Dokume n	0		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak	0	Dokume n	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Layak Huni Beserta PSU							Layak Huni Beserta PSU				
2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						
	Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	0	Dokume n			Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	0	Dokume n		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
A	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						A	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokume n	25.000.000		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokume n	25.000.000	
B	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						B	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan						1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan						

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokume n	30.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokume n	30.000.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokume n	30.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokume n	30.000.000		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25	Dokume n	100.000.000		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25	Dokume n	100.000.000		
2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan rehabilitasi		Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	Ha	50.000.000		Pelaksanaan rehabilitasi		Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4	Ha	50.000.000		
C	Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)						C	Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)							

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14.93	Ha	375.000.000		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14.93	Ha	375.000.000	
D	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						D	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50	Badan Usaha	13.000.000		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50	Badan Usaha	13.000.000	
E	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						E	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga						1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga						

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5	Lembag a	30.000.000		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5	Lembaga	30.000.000	
F	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						F	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	Entitas	20.000.000		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	Entitas	20.000.000	
G	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						G	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	(PPLH) Kabupaten/Kota							(PPLH) Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola	1	Pengadu an	15.000.000		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola	1	Pengadu an	15.000.000	
H	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						H	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
1	Pengelolaan Sampah						1	Pengelolaan Sampah						
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	51418,9	Ton	2.208.909.775		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	51418,9	Ton	2.208.909.775	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPSTkabupaten/ kota atau	46000	Ton	1.140.000.000		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPSTkabupaten/ kota atau	46000	Ton	1.140.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			TPA/TPST Regional							TPA/TPST Regional				

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.16
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
Nihil					

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPRKPLH ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2024-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Sindoro Plus 24/7	DPRKPLH, Masyarakat	APBD	Layanan akses hunian Rusunawa	Layanan terintegrasi	Meningkatkan akses hunian Rusunawa yang terjangkau bagi masyarakat melalui layanan yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel	DPRKPLH 2026
2	Lintas Tebas (Lumpur Tinja Terkurasi Temanggung Bagas Waras)	DPRKPLH, KSM, Masyarakat	APBD	Pengelolaan sanitasi dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang bisa diakses 24 jam dalam 1 minggu secara online.	Layanan terintegrasi	meningkatkan capaian akses sanitasi aman	DPRKPLH 2026

Sumber : DPRKPLH Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH Tahun 2024 ada 17 Penghargaan, Tahun 2025 ada 16 Penghargaan dan Tahun 2026 ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	SKALA	KETERANGAN
1	2026	1. Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir dan Kontribusi pada Transisi Energi	Nasional	DPRKPLH
		2. ProKlim (Kategori Madya) a. Desa Rejosari Kecamatan Bansari b. Desa Balesari Kec Bansari		
2	2025	1. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025: SDN 1 Gondangwayang	Nasional	DPRKPLH
		2. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025, yaitu: a. SDN Tlahap b. MI Muhammadiyah Purwodadi c. SMPN 1 Kaloran d. SMPN 1 Tembarak e. MTsN 2 Temanggung f. MTs Ma'arif Jumo g. SMK Swadaya	Nasional	
		3. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu: a. SMPN 2 Selopampang (Pelaksana Terbaik II) b. SMPN 2 Kledung c. SMPN 2 Pringsurat d. SMPN 3 Temanggung e. SMPN 1 wonoboyo f. MIS Ma'arif Kandangan	Provinsi	
		4. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Peyelamat Lingkungan Hidup	Provinsi	

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	SKALA	KETERANGAN
		Peringkat 2: Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Rukun Desa Bengkal Kecamatan Kranggan		
		5. Apresiasi Inovasi ProKlim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Video Profil ProKlim Terbaik 1: Desa Batusari, Kec. Kledung	Provinsi	
3	2024	1. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 1 Kandungan 2. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 2 Temanggung 3. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMA N 1 Parakan 4. Sekolah Adiwiyata Nasional: SD Muhammadiyah Parakan 5. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Giyono, Kec. Jumo 6. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Gilingsari, Kec. Temanggung 7. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Pratama: Desa Jumo, Kec. Jumo 8. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Madya Tingkat Provinsi: Desa Balesari Kecamatan Bansari 9. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Desa Jumo Kecamatan Jumo 10. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung 11. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 5 Temanggung		DPRKPLH

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	SKALA	KETERANGAN
		12. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 1 Tembarak 13. Sekolah Adiwiyata Provinsi MTs N 2 Temanggung 14. Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MPP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) (MPA Abdi Bumi Desa Batusari Kec. Kledung) 15. Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup atas nama Sukoyo (Dsn. Krecek Ds. Getas Kec. Kaloran) 16. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup Kelompok Pecinta Alam (KPA) Azora Desa Batusari Kec. Kledung 17. Inovasi Proklim (Kategori Video Inovasi ProKlim Terbaik 1 (Desa Gununggempol Kec. Jumo))		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPRKPLH lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2027 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**. Kebijakan ini juga didukung oleh arah kebijakan fiskal yang mengusung tema **“Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”**. Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tahun 2027 mencakup 8 klaster utama yaitu sebagai berikut:

- a. Program PKPN Sektor Kedaulatan Pangan
- b. Program PKPN Sektor Kemandirian Energi dan Air
- c. Program PKPN Sektor Pendidikan
- d. Program PKPN Sektor kesehatan
- e. Program PKPN Sektor hilirisasi dan industrialisasi
- f. Program PKPN dalam Mendukung Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana,
- g. Program PKPN Ekonomi Kerakyatan dan Desa
- h. Program PKPN Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan PKPN tahun 2027 di atas, PKPN yang selaras dengan Tupoksi DPRKPLH adalah Program PKPN dalam Mendukung Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana dengan salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah Program 3 Juta Rumah sebagai upaya untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kegiatan yang selaras dengan Tupoksi DPRKPLH adalah perbaikan RTLH.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH

Tujuan DPRKPLH yang dirumuskan dalam Renstra DPRKPLH 2025-2029 adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan

Permukiman serta Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim” dengan sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim;
2. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja DPRKPLH.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPRKPLH dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPRKPLH Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim			Indeks Kualitas Air	Angka	74,37	74,67
			Indeks Kualitas Udara	Angka	85,02	85,05
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik		Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	79,5	81,00
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	75,5	77,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100
	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman		Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	73,24	75,29
		Program Pengembangan Perumahan				
			1. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100
			2. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
			3. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100
		Program Kawasan Permukiman				
			1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,49	96,66
			2. Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,82	48,85
			3. Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	71,24	77,78
			4. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	80,14	80,45
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	18,06	30,46
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R	%	17,63	18,69
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim		Penurunan Emisi GRK	TonCO ₂ e _q	1.464.403.55	2.470.416.89
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan	%	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
			pengelolaan lingkungan hidup			
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,04	60,07
			Luas Lahan kritis tertangani	Ha	4,25	5
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,71	8,65
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	25,6	32,6
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7	19,6
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	85	100
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	100
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100	100
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	31,6	33,6
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah	%	34,94	45
			Persentase sampah yang terkelola	%	64,87	67,27
			Cakupan Pelayanan persampahan	%	79,58	84,78

Sumber : Renstra DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah upaya dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran DPRKPLH Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan DPRKPLH

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Renja DPRKPLH Tahun 2027 merupakan ikhtisar rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta prioritas pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Rekapitulasi ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran serta memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Uraian rekapitulasi meliputi jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 beserta target kinerja yang ingin dicapai. Seluruh program dan kegiatan telah disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027.

Berdasarkan aspek kewilayahan, pelaksanaan program dan kegiatan memiliki karakteristik sebaran lokasi yang disesuaikan dengan jenis layanan dan sasaran kegiatan. Kegiatan yang bersifat administratif, perencanaan, pengawasan, dan koordinasi dilaksanakan pada lingkup Perangkat Daerah, sedangkan kegiatan yang bersifat pelayanan publik, pembangunan fisik, maupun pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada lokasi-lokasi sesuai kebutuhan, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, maupun lokasi spesifik yang telah ditetapkan.

Kebutuhan pendanaan Renja Tahun 2027 disusun dalam bentuk pagu indikatif yang merupakan estimasi kebutuhan anggaran untuk

mendukung pencapaian target kinerja setiap program, kegiatan, dan subkegiatan. Total pagu indikatif dirinci menurut sumber pendanaan yang meliputi APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang sanitasi, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran pagu indikatif tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil pembahasan pada tahapan penganggaran. Rekapitulasi program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi pelaksanaan, indikator, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan menurut sumber pendanaan sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel rekapitulasi program dan kegiatan Renja DPRKPLH Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						46.967.569.793							64.840.426.952
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.439.633.455							40.393.240.272
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.558.961.000							18.369.910.947
1.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						0							5.073.049
			Persentase jumlah TPS 3R	-		-	17,63 %	0						-	5.073.049
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						0					Masyarakat Kabupaten Temanggung		5.073.049
		-						0					Masyarakat Kabupaten Temanggung		5.073.049
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3 R yang dibangun	-		-	-	0						-	5.073.049
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R						0							5.073.049
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3 R yang dibangun	-		-	0.5 Ton/hari	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		-	5.073.049

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
											penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang g disabilitas.					
2.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						2.558.961.000								18.364.837.898
			Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	-		-	18,06 %	2.558.961.000						-		9.182.418.949
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	-		-	100 %	2.558.961.000						-		9.182.418.949
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.558.961.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng			18.364.837.898
		-						2.558.961.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng			18.364.837.898
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	-	0						-		0
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	2.553.961.000						-		9.182.418.949

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	-	0						-	0
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	-		-	-	5.000.000						-	0
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-		-	-	0						-	0
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	-		-	-	0						-	0
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	0						-	9.182.418.949
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						0							0
		Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	-		-	0 M³/Hari	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	1.03.05.2.01.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000							0
		Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	-		-	1 Unit	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	0
	1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa						0							0
		Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	0 Desa	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
											gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang g disabilitas.				
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						0							0
		Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-		-	0 M³/Hari	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang g disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan		-	0
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						0							0
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	0 Unit	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui		-	0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL				DAERAH
											manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang g disabilitas.	pemberdayaa n ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						0							9.182.418.949
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	0 M³/Hari	0	Kab. Temanggung	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	9.182.418.949

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											penyandang g disabilitas.				
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						2.553.961.000							9.182.418.949
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	262 Rumah Tangga	2.553.961.000	Kab. Temanggung	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan DasarDana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan , kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan , pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang g disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	9.182.418.949
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						20.880.672.455							22.023.329.325
3.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.136.672.611							18.198.468.249
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	-		-	100 %	18.121.672.611						-	18.146.468.249
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000					DPRKPLH Kabupaten Temanggung		1.750.000
		-						1.500.000					DPRKPLH Kabupaten		1.750.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
													Temanggu ng		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000						-	1.750.000
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000							1.750.000
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokume n	1.500.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	1.750.000
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.414.633.985					ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggu ng		12.482.516.993
		-						12.414.633.985					ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggu ng		12.482.516.993
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.414.633.985						-	12.482.516.993
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.414.633.985							12.482.516.993
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	127 Orang/b ulan	12.414.633.985	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	12.482.516.993
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						84.498.000					DPRKPLH Kabupaten		116.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
													Temanggu ng		
		-						84.498.000					DPRKPLH Kabupaten Temanggu ng		116.000.000
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	19.000.000						-	22.000.000
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	28.498.000						-	40.000.000
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	17.000.000						-	24.000.000
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000						-	22.000.000
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000						-	8.000.000
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000							8.000.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberan asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	8.000.000
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.000.000							24.000.000
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	17.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataa	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna		-	24.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
									Kelurahan Sidorejo 0		n ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000							22.000.000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	15.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	22.000.000
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.000.000							22.000.000
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	19.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	22.000.000
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						28.498.000							40.000.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	28.498.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan		-	40.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
											asan kemiskinan .	ayanan publik			
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200.000.000					DPRKPLH Kabupaten Temanggu ng		60.000.000
		-						200.000.000					DPRKPLH Kabupaten Temanggu ng		60.000.000
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	15.000.000						-	30.000.000
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	185.000.000						-	30.000.000
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000							30.000.000
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	11 Unit	15.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	30.000.000
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						185.000.000							30.000.000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	7 Unit	185.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	30.000.000
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.275.042.026					DPRKPLH Kabupaten Temanggu ng		5.295.201.256

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		-						5.275.042.026					DPRKPLH Kabupaten Temanggung		5.295.201.256
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	100.000.000						-	115.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.173.617.026						-	5.177.701.256
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.425.000						-	2.500.000
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.425.000							2.500.000
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.425.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	2.500.000
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000							115.000.000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	100.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0 Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	115.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
									Kecamatan Kranggan Desa Sanggrahan 1						
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.173.617.026							5.177.701.256
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	5.173.617.026	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	5.177.701.256
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.998.600					DPRKPLH Kabupaten Temanggung		243.000.000
		-						160.998.600					DPRKPLH Kabupaten Temanggung		243.000.000
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	64.998.600						-	125.000.000
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	85.000.000						-	105.000.000
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	11.000.000						-	13.000.000
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85.000.000							105.000.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	-		-	24 Unit	85.000.000	Provinsi Jawa	Dana Alokasi	6.Membangun dari	Terwujudnya peningkatan		-	105.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Umum (DAU)	desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						64.998.600							125.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	64.998.600	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	125.000.000
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						11.000.000							13.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	13 Unit	11.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	13.000.000
4.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						619.699.844							830.580.550
			Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	-		-	100 %	604.699.844						-	800.580.550

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-		-	100 %	15.000.000						-	15.000.000
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	-		-	100 %	15.000.000						-	15.000.000
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						15.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota		30.000.000
		-						15.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota		30.000.000
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000						-	15.000.000
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000						-	15.000.000
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						5.000.000							15.000.000
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokume n	5.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas		-	15.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
											an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000							15.000.000
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokume n	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	15.000.000
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng yang korban bencana atau relokasi program pemerintah		0
		-						0					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng yang korban bencana atau relokasi program pemerintah		0
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	0						-	0
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang	-		-	-	0						-	0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
			Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota												
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						0							0
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	- Unit Rumah	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya		-	0
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						0							0
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	0 Unit Rumah	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	0
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						604.699.844					Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		800.580.550
		-						604.699.844					Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		800.580.550
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	-		-	-	604.699.844						-	800.580.550

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
			dan/atau Rumah Khusus												
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						604.699.844							800.580.550
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-		-	12 Dokumen	604.699.844	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Kertosari 0 Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Sidorejo 0 Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Parakan Kelurahan Parakan Wetan 0 Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Parakan Kelurahan Kauman 0 Provinsi Jawa	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataaan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	800.580.550

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
									Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Ngadirejo Kelurahan Manggon 0 Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Kranggan Kelurahan Kranggan 0						
5.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						2.124.300.000							2.994.280.526
			persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	-		-	48,82 %	2.124.300.000						-	2.994.280.526
			Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	-		-	80,14 %	2.124.300.000						-	2.994.280.526
			Persentase penanganan rumah tidak layak huni	-		-	71,24 %	2.124.300.000						-	2.994.280.526
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	-		-	96,49 %	2.124.300.000						-	2.994.280.526
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						200.000.000					DPRKPLH, masyarakat, dan pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman		0
		-						200.000.000					DPRKPLH, masyarakat, dan pemangku kepentingan bidang		0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
													perumahan dan kawasan permukiman		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	-		-	-	200.000.000						-	0
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						200.000.000							0
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	-		-	3 Dokumen	200.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	0
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.924.300.000					Masyarakat Kabupaten Temanggung yang belum memiliki Rumah Layak Huni		2.994.280.526
		-						1.924.300.000					Masyarakat		2.994.280.526

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
												Kabupaten Temanggu ng yang belum memiliki Rumah Layak Huni			
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-		-	-	0						-	500.000.000
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	-	1.924.300.000						-	2.494.280.526
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						1.924.300.000							2.494.280.526
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	89 Unit Rumah	1.924.300.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	2.494.280.526
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						0							500.000.000
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-		-	0 Dokume n	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		-	500.000.000
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.527.936.338							24.447.186.680

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						23.527.936.338							24.447.186.680
6.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						85.000.000							45.657.438
			Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-		-	100 %	85.000.000						-	45.657.438
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	-		-	100 %	85.000.000						-	45.657.438
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						85.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		45.657.438
		-						85.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		45.657.438
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		-	-	85.000.000						-	45.657.438
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						85.000.000							45.657.438
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokume n	85.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembanguna n		-	45.657.438

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
7.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						331.500.000							255.714.141
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-		-	60,04 Angka	331.500.000						-	255.714.141
			Luas Lahan kritis tertangani	-		-	4,25 Ha	331.500.000						-	255.714.141
			Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	-		-	7,71 %	331.500.000						-	255.714.141
			Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	-		-	25,60 %	236.500.000						-	164.714.141
			Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	-		-	15,70 %	236.500.000						-	164.714.141
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						236.500.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		164.714.141
		-						236.500.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		164.714.141
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	30.000.000						-	32.500.000
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	-	50.000.000						-	31.214.141
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	156.500.000						-	101.000.000
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						50.000.000							31.214.141

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	1 Dokume n	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembanguna n		-	31.214.141
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						30.000.000							32.500.000
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	1 Dokume n	30.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembanguna n		-	32.500.000
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						156.500.000							101.000.000
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	25 Dokume n	156.500.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek		-	101.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
											melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	pembanguna n			
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						95.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		91.000.000
		-						95.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		91.000.000
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	95.000.000						-	91.000.000
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi						95.000.000							91.000.000
		kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	4.25 Ha	95.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembanguna n		-	91.000.000
8.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						16.314.340.000							17.234.829.379
			Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	-		-	85%	16.314.340.000						-	17.234.829.379

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						16.314.340.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		17.234.829.379
		-						16.314.340.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		17.234.829.379
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-		-	-	15.690.000.000						-	10.000.000.000
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	624.340.000						-	7.234.829.379
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						624.340.000							7.234.829.379
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	18.27 Ha	624.340.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Parakan Kelurahan Parakan Kauman 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjut kan pengemban gan infrastruk tur dan meningkat kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembanguna n		-	7.234.829.379
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						15.690.000.000							10.000.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-		-	1 Unit	15.690.000.000	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Temanggung Kelurahan Temanggung II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjut kan pengemban gan infrastruk tur dan meningkat kan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembanguna n		-	10.000.000.000
9.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						43.000.000							42.646.097
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	-		-	100 %	43.000.000						-	42.646.097
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	-		-	100 %	43.000.000						-	42.646.097
			Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	-		-	100 %	43.000.000						-	42.646.097
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau						43.000.000					Pelaku usaha dan		42.646.097

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
		Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											kegiatan yang memiliki izin lingkungan di wilayah Kabupaten Temanggung		
		-						43.000.000					Pelaku usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan di wilayah Kabupaten Temanggung		42.646.097
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	13.000.000						-	10.146.097
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	-	30.000.000						-	32.500.000
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						30.000.000							32.500.000
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	1 Dokumen	30.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		-	32.500.000
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah						13.000.000							10.146.097

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
		terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	50 Badan Usaha	13.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		-	10.146.097
10.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						50.000.000							20.292.195
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	-		-	31,60 %	50.000.000						-	20.292.195
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000					Sekolah di Kabupaten Temanggung		20.292.195
		-						50.000.000					Sekolah di Kabupaten Temanggung		20.292.195
			Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	-	50.000.000						-	20.292.195
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan						50.000.000							20.292.195

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
		formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat													
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/ kota yang terdaftar di kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	5 Lembaga	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		-	20.292.195
11.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						20.000.000							10.146.097
			Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	-		-	100 %	20.000.000						-	10.146.097
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						20.000.000					Masyarakat Peduli Lingkungan		10.146.097
		-						20.000.000					Masyarakat Peduli Lingkungan		10.146.097
			Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-		-	-	20.000.000						-	10.146.097
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						20.000.000							10.146.097
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	-		-	3 Entitas	20.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2. Memantapkan sistem pertahanan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip		-	10.146.097

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pendidikan/Filantrop hi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH								keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swasembad a pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembanguna n			
12.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						15.000.000							10.146.097
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	15.000.000						-	10.146.097
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Masyarakat di Bidang				15.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		10.146.097
		-						15.000.000					Masyaraka t Kabupaten Temanggu ng		10.146.097
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ dikelol a	-		-	-	15.000.000						-	10.146.097
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						15.000.000							10.146.097
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tinek at	-		-	1 Pengadu an	15.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian linekungan		-	10.146.097

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
			Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola								mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	dalam seluruh aspek pembangunan			
13.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						6.669.096.338							6.827.755.236
			Cakupan Pelayanan persampahan	-		-	79,58 %	6.669.096.338						-	6.827.755.236
			Persentase sampah yang terkelola	-		-	64,87 %	6.669.096.338						-	6.827.755.236
			Timbulan sampah terolah difasilitas pengolah sampah	-		-	34,94 %	6.669.096.338						-	6.827.755.236
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						6.669.096.338					Masyarakat Kabupaten Temanggung		6.827.755.236
		-						6.669.096.338					Masyarakat Kabupaten Temanggung		6.827.755.236
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	-		-	-	1.239.999.563						-	4.773.684.843
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	-	5.429.096.775						-	2.054.070.393

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTR A	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						5.429.096.775							2.054.070.393
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	51418,9 Ton	5.429.096.775	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		-	2.054.070.393
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						1.239.999.563							4.773.684.843
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	-		-	46000 Ton	1.239.999.563	Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung Kecamatan Kranggan Desa Sanggrahan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		-	4.773.684.843
								46.967.569.793							64.840.426.952

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan DPRKPLH Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga diperlukan penyesuaian.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPRKPLH Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA DPRKPLH			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	Pagu Indikatif
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	46.967.569.793		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	46.967.569.793	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.439.633.455		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.439.633.455	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.558.961.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.558.961.000	-
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	1.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	-
A	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0	A	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0	-
-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	0	-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	0	-
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.558.961.000	2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.558.961.000	-
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.558.961.000	A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.558.961.000	-
-	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	-	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	-
-	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	-	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	-
-	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	0	-	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	0	-
-	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	-	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	-
-	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0	-	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0	-
-	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0	-	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	0	-
-	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.553.961.000	-	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.553.961.000	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.880.672.455		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.880.672.455	-
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.136.672.611	3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.136.672.611	-
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	-

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	156.500.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	95.000.000
	Pelaksanaan rehabilitasi	95.000.000
8.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.314.340.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	16.314.340.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	624.340.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	15.690.000.000
9.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	43.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13.000.000
10.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	50.000.000
11.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	156.500.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	95.000.000
	Pelaksanaan rehabilitasi	95.000.000
8.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.314.340.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	16.314.340.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	624.340.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	15.690.000.000
9.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	43.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.000.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13.000.000
10.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	50.000.000
11.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20.000.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000

Pagu Indikatif
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.000.000
12.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000
13.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.669.096.338
	Pengelolaan Sampah	6.669.096.338
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.429.096.775
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.239.999.563
		46.967.569.793

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.000.000
12.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15.000.000
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000
13.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.669.096.338
	Pengelolaan Sampah	6.669.096.338
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	5.429.096.775
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.239.999.563
		46.967.569.793

Pagu Indikatif
-
-
-
-
-
-
-
-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikatif DPRKPLH Tahun 2027 kondisinya tetap yaitu sebesar Rp46.967.569.793.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V					
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH					
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	71,11	73,24	DPRKPLH
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
1	Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Air	Angka	74,71	74,37	DPRKPLH
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	77,23	85,02	DPRKPLH
3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TonCO ₂ eq	709.905,71	1.464.403,55	DPRKPLH

Sumber : Renstra DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci DPRKPLH sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO · IK K	IKK HASIL	RUMUS/PERSAM AAN	SATUA N	EVALUAS I HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGE T 2027	SUMBE R DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
		1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	100	100	DPRKPLH
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	26	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	%	0	48,82	DPRKPLH
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		90,54		
		27	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	%	846	3,51	DPRKPLH
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		7253		
		28	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	Tidak dapat dilaksanakan	100	DPRKPLH
				Jumlah unit rumah kabupaten		Tidak dapat dilaksanakan		
10	Pertanahan	48	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	3	100	DPRKPLH
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		3		
		50	Penanganan sengketa tanah	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	%	24	100	DPRKPLH

NO	URUSAN	NO · IK K	IKK HASIL	RUMUS/PERSAM AAN	SATUA N	EVALUAS I HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGE T 2027	SUMBE R DATA
			garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		24		
11	Lingkunga n Hidup	51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,54	75,54	DPRKPL H
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (37,6%)		74,71		
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (40,5%)		77,23		
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (21,9%)		60,15		
		52	Terlaksanan ya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat dikelola	%	94871,68	64,87	DPRKPL H
				Total vol timbunan sampah Kabupaten		150176		

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPRKPLH untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPRKPLH Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPRKPLH itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPRKPLH dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPRKPLH Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRKPLH Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96,16%, realisasi Belanja Modal sebesar 92,03%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 18,23%, realisasi Belanja Modal sebesar 0%. Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 DPRKPLH mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp46.967.569.793,- yang terdiri dari 12 program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
13. Program Pengelolaan Persampahan

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DPRKPLH dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

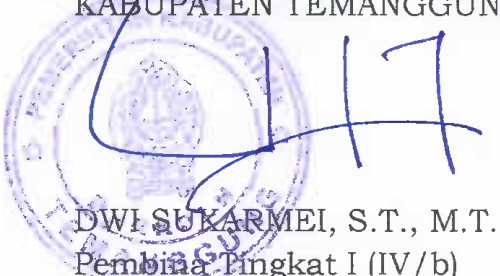
Temanggung, 24 Juli 2026
KEPALA DPRKPLH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197405082003121008

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
13. Program Pengelolaan Persampahan

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DPRKPLH dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 24 Juli 2026
KEPALA DPRKPLH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197405082003121008